

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA

IMPLEMENTATION OF COVID-19 VACCINATION POLICY FOR ELDERLY

Samsul Ode,^{1*} Nur Ikawati², Hendra Wijayanto³, Benediktus Dalupe⁴, Surya Yudha Regif⁵

^{1,2,3,4}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sunter Permai Raya, DKI Jakarta

⁵Universitas Timor, Kefamenanu Km.9, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

*Koresponden email : samsul.ode@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Fokus penelitian ini membahas implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 pada lansia di Kelurahan Jelambar Baru Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Kecamatan Jelambar Baru berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari 6 indikator. Pertama, kebijakan bersifat *top-down* dalam menetapkan target sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk mencapai target tersebut, salah satunya kerjasama dengan CSR dan instansi lain. Kedua, terkait sumber dana, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan vaksinasi yang tertuang dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2021 untuk mendukung kegiatan yang bekerjasama dengan CSR. Sumber daya manusia yang dimiliki digunakan untuk mendidik keluarga lanjut usia baik *offline* maupun *online*. Ketiga, untuk komunikasi dengan instansi lain ada ego sektoral dalam transparansi data lansia yang menjadi sasaran. Namun komunikasi dengan pelaksana di lapangan berjalan dengan baik sehingga terjadi terobosan yaitu penjemputan lansia dan vaksinasi keliling. Keempat, pendekatan persuasif dengan menjemput lansia berhasil meningkatkan partisipasi lansia. Kelima, kebijaksanaan pimpinan membuat terobosan dengan mendatangkan dua orang lansia agar satu orang pendamping bisa ikut vaksinasi. Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi penerimaan lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Vaksinasi COVID-19, Lansia

ABSTRACT

The focus of this study discusses the implementation of the COVID-19 vaccination policy for the elderly in the Jelambar Baru Sub-District West Jakarta Administration in 2021. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques with interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that the implementation of COVID-19 vaccination for the elderly in Jelambar Baru Sub-District is going quite well. This can be seen from the 6 indicators. First, policy is top-down in setting targets so that various breakthroughs are needed to achieve the target, one of which is in collaboration with CSR and other agencies. Second, regarding the source of funds, there is no special budget for the implementation of vaccinations contained in the 2021 Budget Use (PA) to support activities in collaboration with CSR. The human resources that are owned are used for educating elderly families both offline and online. Third, for communication with other agencies there is a sectoral ego in data transparency of the elderly who are the targets. However, the communication with the implementers in the field went well so that there was a breakthrough, namely the elderly pick-up and mobile vaccination. Fourth, a persuasive approach by picking up the elderly has succeeded in increasing the participation of the elderly. Fifth, the leadership's discretion creates a breakthrough by bringing two elderly people so that one companion can participate in the vaccination. Sixth, that social, economic and political conditions greatly affect the acceptance of the elderly to take part in the COVID-19 vaccination.

Keywords: Policy Implementation, COVID-19 Vaccination, Elderly

PENDAHULUAN

Penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta pada tahun 2020 semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data corona.jakarta.go.id diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Provinsi DKI Jakarta 183.735 kasus dan 2.671 diantaranya kasus meninggal dunia. Warga lanjut usia (lansia) dengan usia 60 tahun ke atas menjadi penyumbang terbesar kasus kematian dengan total 50% kasus kematian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah

penyebaran penularan virus COVID-19 termasuk dengan vaksinasi. Vaksinasi bertujuan (Rahayu et al, 2021) untuk menciptakan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga ketika suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Damayanthi et al, 2021). Lansia dengan kondisi tubuh yang lemah menyebabkan mudah terserang berbagai penyakit termasuk mudah terpapar COVID-19 dan memiliki

resiko kematian yang cukup tinggi sehingga pemberian vaksin sebagai upaya mengurangi resiko tersebut jika terpapar *COVID-19*.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan vaksinasi yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 kepada para tenaga kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan infrastruktur dalam pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* termasuk melakukan sosialisasi terkait program vaksinasi *COVID-19*. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Persiapan Penyelenggaraan Vaksinasi *COVID-19* Bagi Lansia yang ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan pada tanggal 18 Desember 2020 menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari asisten Sekretaris Daerah, dinas terkait serta camat dan lurah untuk mengambil bagian sesuai dengan kewenangannya dalam menyiapkan infrastruktur dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*. (Brauner et al, 2021) Melalui pertimbangan dampak intervensi terhadap penularan *COVID-19* selama gelombang pertama wabah, sangat penting peran pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang cara mengendalikan pandemi

Melalui Instruksi Walikota Jakarta Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Lansia maka menginstruksikan kepada UKPD maupun SKPD terkait termasuk camat dan lurah untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing. Dalam instruksi disebutkan bahwa para lurah kota Administrasi Jakarta Barat supaya koordinasi dengan camat dan puskesmas kecamatan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi; mengajak peran serta RT/RW, LKM, FKDM, karang taruna, Kader PKK, Dasawisma, Jumantik dan unsur masyarakat dalam menggerakkan masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi; menyampaikan informasi jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat; memfasilitasi penyiapan lokasi, tim pendukung teknis dan pengaturan lapangan. (Gilmore, 2020) Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai komponen mendasar dalam pengentasan respons wabah *COVID-19*.

Kelurahan Jelambar Baru pada tahun 2020 merupakan wilayah dengan kasus positif *COVID-19* tertinggi di Kecamatan Grogol Petamburan. Berdasarkan data internal Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan diketahui bahwa terdapat 1.653 kasus positif dan 20 diantaranya meninggal. (Péterfi et al, 2022) Lansia dengan komorbid dan penyakit terminal menjadi penyumbang terbesar dalam kasus kematian. Total

kematian lansia sebanyak 12 lansia akibat terpapar virus *COVID-19* di Kelurahan Jelambar Baru terdapat 5.459 lansia dan dari total tersebut terdapat 641 lansia dengan komorbid dan penyakit terminal seperti jantung, diabetes, stroke, gagal ginjal dan auto imun (data internal Puskesmas Kelurahan Jelambar Baru, 2020).

Menindaklanjuti Instruksi Walikota Jakarta Barat Nomor 12 Tahun 2021 Pelaksanaan Vaksinasi Lansia maka Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru menyediakan sentra vaksinasi massal yang bertempat di SDN 09 Jelambar Baru dan RPTRA Duta Mas. Berdasarkan data dari Sudin Kesehatan target sasaran vaksinasi *COVID-19* bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru sebanyak 5.459 dan pada Bulan Juli 2021 sudah tervaksin dosis 1 minimal 80% dari target sasaran vaksinasi. Berbanding temuan dalam artikel terdahulu seperti dalam judul "Penyuluhan Kesehatan Tentang : Pentingnya Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia Di RW.01 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur" (Lukas & Triani, 2020) menunjukkan simpulan sebesar 25 lansia (100%) di RW 01 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur bersedia untuk melakukan vaksinasi *COVID-19*. Para responden memiliki antusiasme keinginan vaksinasi sebelum edukasi sebesar 65% dan setelah mendapatkan edukasi sebesar 89%.

Vaksinasi *COVID-19* bagi lansia terdapat berbagai permasalahan sehingga sampai dengan Bulan Februari 2022 capaian vaksinasi *COVID-19* di Kelurahan Jelambar Baru masih jauh dari target yakni baru mencapai 76% dari awalnya Bulan Juli 2021 ditargetkan sudah mencapai 80%. Banyak lansia yang terpengaruh dengan berita hoax (Ida Masnita, 2021). Keengganan lansia mengikuti vaksinasi akibat tidak didukung oleh pihak keluarga dengan berbagai alasan salah satunya para lansia tersebut mempunyai komorbid (Hanawi et al, 2021). Berdasarkan keterangan dokter Puskesmas Kelurahan Jelambar Baru terdapat 641 lansia dengan komorbid dan ada 33 lansia yang kondisinya tidak terkontrol sehingga tidak dapat diberikan vaksinasi. Selain itu, ketika dikonfirmasi ke wilayah ternyata target sasaran yang ditetapkan dari Sudin Kesehatan tersebut banyak yang sudah meninggal dan bahkan tidak dikenal maupun tidak diketahui keberadaannya oleh RT/RW setempat.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru dalam meningkatkan capaian vaksinasi *COVID-19* bagi lansia tersebut menjadi hal yang menarik untuk diketahui lebih jauh terkait

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Penggunaan teori dari Van Meter dan Van Horn tersebut mampu menghubungkan isu kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia dengan implementasi kebijakan serta mampu menghubungkan kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia dengan kinerja kebijakan yang menggunakan 6 indikator/variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Indikator tersebut terdiri dari ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; karakteristik badan pelaksana; kecenderungan badan pelaksana; kondisi ekonomi, sosial dan politik (Kasmad, 2018).

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Bungin, 2011) yang akan digunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan secara objektif dan mendalam serta bersifat faktual sehingga dapat mendeskripsikan implementasi portal Jakarta Open Data dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010) melalui mekanisme wawancara, observasi dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan kepada para informan yakni Kepala Seksi dan Tim Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik di Bidang Informasi Publik, Diskominfo Provinsi DKI Jakarta serta Tim Pengolah Data di portal Jakarta Open Data. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat. Data diperoleh dengan cara observasi awal dan observasi selama riset berlangsung. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Lansia

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi Lansia di wilayah Jakarta Barat diatur dalam Instruksi Walikota Jakarta Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Lansia. Berdasarkan regulasi tersebut menginstruksikan kepada UKPD maupun SKPD terkait untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi lansia di wilayah Kelurahan Jelambar Baru dimulai pada bulan Maret 2021 yang bertempat di SDN 09 Jelambar Baru.

Berdasarkan data dari Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan yang mengacu kepada data DUKCAPIL maka diketahui bahwa terdapat 5.459 lansia yang menjadi target sasaran vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Jelambar Baru. Target sasaran vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target Sasaran Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia

NO	RW	SASARAN LANSIA
1	1	284
2	2	489
3	3	401
4	4	496
5	5	426
6	6	230
7	7	474
8	8	519
9	9	439
10	10	584
11	11	899
12	12	135
13	13	83
TOTAL		5.459

Sumber: *datawarga-dukcapil.jakarta.go.id* (2021)

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa total target sasaran bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru sejumlah 5.459 lansia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada dr Septian diketahui bahwa dari jumlah lansia terdapat 641 lansia dengan komorbid dan terdapat 33 lansia yang mempunyai komorbid dan penyakit terminal dengan kondisi yang tidak terkontrol, sehingga kemungkinan besar tidak dapat dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian, terdapat 38 lansia yang mempunyai komorbid dan penyakit terminal tetapi kondisinya terkontrol sehingga mereka dapat diberikan vaksinasi jika mendapat surat rekomendasi dari dokter yang merawatnya atau pada saat mereka datang ke sentra vaksin kondisi kesehatannya layak untuk diberikan vaksin. Pada penelitian sebelumnya terkait implementasi vaksin COVID-19 hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kecemasan lansia comorbid dengan pemberian vaksinasi COVID-19 (p-value=0.000). Sikap dengan kecemasan lansia comorbid dengan pemberian vaksinasi COVID-19 (p-value=0.000). Pengetahuan dan sikap berhubungan dengan kecemasan lansia comorbid dengan pemberian vaksinasi COVID-19, vaksinasi COVID-19 harus dilakukan supaya imun tubuh

meningkat dan resiko tertular virus COVID-19 lebih rendah dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga pandemi ini cepat berakhir (Ernawati, 2022).

Namun, dari analisis lapangan terdapat beberapa alasan mengapa sebagian lansia takut untuk divaksinasi COVID-19 yakni: (a). Takut akan efek samping: Beberapa lansia takut mengalami efek samping dari vaksin, seperti demam, nyeri, atau tidak nyaman. (b). Kurangnya informasi yang mengakibatkan banyak lansia mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang akurat tentang vaksin, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketakutan. (c). Faktor psikologis, ketakutan akan vaksin adalah faktor utama mengapa banyak lansia menolak untuk divaksinasi. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada sistem perawatan kesehatan atau ketakutan umum terhadap prosedur medis.

Oleh karena dengan dasar hasil wawancara peneliti dengan informan, observasi peneliti dan hasil dokumentasi peneliti tentang implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru maka dengan dikaitkan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai berikut.

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator kinerja merupakan tahapan krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat diketahui bahwa terjadi ego sektoral. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan jumlah dan target sasaran vaksinasi COVID-19 bagi lansia akan tetapi untuk menjangkau target sasaran terdapat kendala terkait lansia dan belum divaksinasi sehingga menyulitkan Pemerintah kelurahan Jelambar Baru dalam melakukan berbagai terobosan, salah satunya melakukan penjemputan bagi lansia. Akibat tidak mempunyai data yang dapat menjadi acuan maka para pelaksana mengimplementasikan kebijakan berusaha secara optimal dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Target vaksinasi COVID-19 bagi lansia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kelurahan Jelambar Baru menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

terutama lansia dengan komorbid dan penyakit terminal untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Hal tersebut disebabkan lansia dengan komorbid dan penyakit terminal mempunyai resiko yang cukup tinggi jika terkena virus. Untuk meningkatkan capaian tersebut maka Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru kerjasama dengan berbagai lintas sektor termasuk kerjasama dengan TNI, POLRI dan CSR untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru bersinergi dengan TNI, POLRI dan CSR. Beberapa kebijakan gagal mencapai tujuannya dan beberapa berhasil. Lebih sering tidak, terkadang tidak jelas apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal karena tujuannya tidak jelas, atau karena banyak sekali tujuan perlu ada interpretasi yang jelas kepada penerima kebijakan (FitzGerald, 2019). Hal itu terbukti bahwa antar jemput bagi lansia dan pemberian *door prize* untuk menunjang minat warga mengikuti vaksinasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia yakni pada Bulan Juli 2021 sudah mencapai 80% dari total target sasaran vaksinasi COVID-19 bagi lansia

2. Sumber-sumber kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan, yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber – sumber yang tersedia. Sumber – sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan mempelancar implementasi yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru tidak didukung oleh anggaran yang ada di dalam Penggunaan Anggaran (PA) Kelurahan Jelambar Baru tahun 2021. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19, salah satunya dengan kerjasama dengan CSR untuk membantu operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung berbagai sumber pendukung kebijakan, salah satunya sumber dana. Persiapan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia sudah dapat dikatakan baik akan tetapi tanpa didukung sumber dana yang cukup pelaksanaan tersebut tidak optimal. Seharusnya, sumber dana (Hasibuan et al, 2020) untuk Penanganan Covid-19, telah ditetapkan presiden bahwa anggaran pemerintah (pemerintah pusat ke pemerintah daerah) diprioritaskan

untuk kepentingan umum dalam penanganan COVID-19.

Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru terdapat kendala sehingga hasil capaiannya masih rendah dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat adalah setelah divaksin banyak datanya tidak diinput ke dalam sistem Pcare milik BPJS. Data yang terdapat pada *website corona.jakarta.go.id* diambil dari data yang telah diinput ke dalam Pcare, sehingga dengan banyaknya warga yang tidak terinput maka capaian vaksinasi tidak bertambah. Mereka yang tidak terinput ini mayoritas tidak vaksin di sentra vaksinasi Kelurahan Jelambar Baru akan tetapi mengikuti vaksinasi massal yang diadakan oleh beberapa instansi di luar Kelurahan Jelambar Baru.

Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru untuk menunjang peningkatan partisipasi warga maka melakukan edukasi terhadap lansia maupun keluarga yang mempunyai lansia. Edukasi tentang pentingnya vaksinasi bagi lansia dengan komorbid dan penyakit terminal dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Hal tersebut dilakukan secara intensif Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru karena masih banyak keluarga mempunyai lansia takut orang tuanya divaksin dengan alasan mempunyai penyakit penyerta. Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru dalam melaksanakan edukasi tersebut kerjasama dengan Kader Dasawisma, Kader PKK di tingkat RW, Kader Posyandu di tingkat RW dan serta team Puskesmas Kelurahan Jelambar Baru. Mereka datang dari rumah ke rumah yang mempunyai lansia atau keluarga yang mempunyai lansia diundang untuk mengikuti edukasi melalui aplikasi *zoom* maupun *google meet*.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi didalam dan antara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn prospek-prospek tentang implementasi yang efektif salah satunya dengan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut. (OECD, 2020) pentingnya fungsi koordinasi kebijakan CoG di seluruh pemerintahan, memobilisasi bukti yang dapat dipercaya, dan komunikasi kepada publik. Namun,

dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan lancar dan kondusif maka terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru dalam pelaksanaan vaksin mobile ke 13 RW yang ada di Wilayah Kelurahan Jelambar Baru mulai Bulan Oktober 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 berjalan dengan baik. Para pengurus RW, pengurus RT dan para kader yang ada membantu dengan baik sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk datang ke tempat vaksin.



Gambar 1&2. Pelaksanaan *Mobile Vaksin* di Kelurahan Jelambar Baru

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru kesulitan mendapatkan data lansia yang valid untuk melakukan antar jemput lansia maka dapat dilihat bahwa komunikasi antar organisasi dalam transparansi data menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan sebuah kebijakan (Pramiyanti et al, 2020). Tingkat transparansi dan kepercayaan yang rendah terhadap informasi yang dirilis oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19 dapat menurunkan peluang keberhasilan penanganan wabah virus corona. Melalui komunikasi yang baik sebuah kebijakan akan mampu berjalan secara efektif. Oleh karena itu komunikasi antar organisasi sangat diperlukan sebagai salah satu sarana mencapai keberhasilan kebijakan. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kerjasama dalam berbagai hal. Kerjasama yang dilakukan Kelurahan Jelambar Baru dengan CSR, TNI maupun Polri tidak akan terimplementasi dengan baik tanpa didukung data yang valid dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa masih terjadi fragmentasi dalam birokrasi pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Kebijakan yang banyak melibatkan banyak lini sektor cenderung terjadi fragmentasi dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia dengan komorbid dan penyakit terminal, koordinasi dan komunikasi dengan SKPD maupun berbagai unsur lain yang terkait pelaksanaan vaksinasi lansia termasuk para ketua RT/RW, LMK, tokoh masyarakat dan para kader di wilayah sudah dilaksanakan dengan baik dan mengetahui tujuan dari kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah kebijakan (Arifin, 2022).

Kapasitas dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang berhasil maka komunikasi sangat penting dalam penanganan COVID 19. Sebuah strategi komunikasi yang mempromosikan diseminasi yang tepat waktu, faktual, dan responsif informasi kepada segmen kunci dari publik dan meminimalkan miskomunikasi dalam membimbing tindakan terkoordinasi yang diinginkan. Pemerintahan yang efektif komunikasi akan memainkan peran utama dalam kesuksesan penanganan pandemi. Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru mampu menjalin komunikasi dengan pelaksana di tingkat bawah sehingga

berbagai terobosan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik meskipun terjadi sedikit kendala dalam mendapatkan data sasaran vaksinasi COVID-19 bagi lansia.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana berkaitan dengan konteks beberapa kebijakan dituntut pelaksana untuk tegas dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang lebih persuasif dan demokratis. Selain itu, diperlukan pengawasan dan kontrol hierarki kepada pelaksana terbawah pada saat implementasi. (Taher et al, 2022). Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan sukses di lapangan, maka harus didukung struktur birokrasi Dalam implementasi kebijakan yang kompleks, Kerjasama dari badan-badan pelaksana diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif untuk melaksanakan kebijakan, hal ini akan berdampak pada sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat implementasi kebijakan.

Semua jajarannya Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru melakukan antar jemput terhadap lansia yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Mereka mendatangi keluarga yang mempunyai lansia dari pintu ke pintu sesuai data yang telah diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Grogol Petamburan, akan tetapi tidak semua keluarga yang mempunyai lansia menerima dengan baik kedatangan petugas dengan berbagai alasan, bahkan ada yang mengatakan bahwa orang tuanya sudah divaksin di tempat lain tetapi ketika diminta menunjukkan bukti telah divaksin tidak mau menunjukkan dengan berbagai alasan. Kerja keras yang dilakukan jajarannya Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru untuk melakukan antar jemput lansia sedikit membuahkan hasil. Tingkat partisipasi lansia sedikit meningkat dibanding sebelum dilakukan kebijakan antar jemput lansia.

Karakteristik badan pelaksana kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia mempunyai jaringan komunikasi baik terhadap unsur pelaksana maupun komunikasi terhadap unsur di luar organisasi terjalin cukup baik. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi faktor pendukung yang penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya pengawasan dan evaluasi terhadap sebuah program maka program tersebut tidak berjalan secara optimal.

5. Disposisi atau kecenderungan pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (2014) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat terjadi akibat

kebijakan merupakan bukan formulasi kebijakan yang disusun atau diformulasikan oleh organisasi setempat tetapi kebijakan yang bersifat top down dan pengambil keputusan tidak mengetahui berbagai permasalahan atau kondisi di wilayah tempat kebijakan dilaksanakan. Pencapaian target yang harus dikejar oleh para implementator ini sebagai akibat dari sebuah kebijakan yang ada hanya bersifat top down. Para pembuat kebijakan tidak mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh implementator ketika berhadapan langsung dengan masyarakat. Implementator di tingkat paling bawah terkadang kesulitan untuk melakukan disposisi maupun diskresi terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah tingkat atasnya (Sukmawati et al, 2021). Jika implementor memiliki disposisi yang baik, tentu akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang didengungkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi efektif

Melihat capaian vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru masih rendah dibanding kelurahan lain di Kecamatan Grogol Petamburan maka pada vaksinasi COVID-19 bagi lansia fase kedua maka Pemerintah Kelurahan Jelambar Baru membuat surat edaran dengan menginstruksikan bahwa bagi yang membawa satu orang lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 maka dua anggota keluarga lainnya dapat divaksin. Surat edaran tersebut dibagikan kepada 13 (tiga belas) RW yang ada di wilayah Kelurahan Jelambar Baru.

Disposisi memang diperlukan dalam menentukan keputusan untuk dilaksanakan akan tetapi diskresi bagi seorang bawahan cukup berperan dalam mengambil tindakan ketika terjadi permasalahan. Hal tersebut terlihat dari sikap seorang Sekretaris Kelurahan untuk mengambil diskresi kebijakan untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 bagi lansia fase kedua. Langkah tersebut diambil tanpa instruksi dari pemerintah tingkat atasnya yakni Pemerintah Kecamatan Grogol Petamburan. Pelaksana yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan sebagai pelaksana program lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan dibandingkan dengan atasan yang mengeluarkan kebijakan. Artinya itu membantah teori dari Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap dari badan pelaksana.

6. Keadaan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang menjadi perhatian terakhir dalam menilai kinerja implementasi adalah keadaan lingkungan eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kelurahan Jelambar Baru dalam keadaan lingkungan yang cukup kondusif akan tetapi keadaan tingkat ekonomi, kondisi sosial dan afiliasi terhadap pilihan politik dapat mempengaruhi penerimaan terhadap pemberian vaksinasi.

Kondisi sosial, ekonomi dan pandangan politik seseorang sangat berpengaruh terhadap penerimaan informasi terkait vaksinasi. Berita hoax yang tersebar di berbagai media sebagai sarana bagi oknum politisi untuk menggiring opini masyarakat bahwa pemerintah mengambil kebijakan yang salah dalam menangani pandemi COVID-19. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit pemerintah dan ahli yang menyebabkan anti vaksinasi, pasokan vaksinasi yang kurang (French, 2021). Selain itu, masyarakat yang termakan berita hoax tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang masih tergolong ekonomi bawah sehingga dalam memahami sebuah informasi yang ada langsung diterima tanpa mencari informasi pembandingan, hanya mendengar dari satu pihak. Kondisi ekonomi yang dapat dikatakan rendah menolak adanya virus corona dengan tujuan mempengaruhi orang lain karena dengan adanya virus tersebut menyebabkan kondisi ekonomi golongan bawah bertambah sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Alternatif Vaksinasi COVID-19 Lansia

Pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi lansia dengan komorbid dan penyakit terminal disebabkan oleh daya tahan tubuh lansia tidak sama dengan orang dengan usia muda. Daya tahan tubuh mereka tidak kuat dan tidak cepat dalam melawan virus akibat penuaan. Vaksin COVID-19 memang juga dirancang dan digunakan bagi lansia dengan komorbid, akan tetapi tidak semua lansia yang mempunyai penyakit penyerta dapat divaksin. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi lansia dengan komorbid diabetes dapat diberikan vaksin asal tidak ada komplikasi akut dan dalam kondisi stabil. Selain itu lansia dengan komorbid penyakit lain dapat diberikan vaksinasi jika telah mendapatkan surat reko-mendasi dari dokter yang

merawatnya yang menyatakan bahwa pasien tersebut layak untuk diberikan vaksinasi COVID-19.

Lansia dengan komorbid dan penyakit terminal dapat menerima vaksin jika kondisi penyakit yang menyertainya dapat terkontrol. Artinya lansia tersebut selalu dalam pengawasan dokter yang menanganinya serta rutin minum obat yang telah diresepkan oleh dokter. Bagi lansia dengan komorbid dan penyakit terminal maka vaksin yang direkomendasikan adalah jenis vaksin sinovac, aztrazeneca dan moderna. Tiga vaksin tersebut menurut dr. Septian cukup aman digunakan bagi yang mempunyai komorbid dan penyakit terminal. Khusus vaksin jenis moderna memang diperuntukkan bagi yang mempunyai komorbid seperti gagal ginjal, gangguan imun dan bagi mereka yang tidak dapat diberikan jenis vaksin sinovac dan aztrazeneca. Namun untuk mendapatkan jenis vaksin tersebut harus membawa surat rekomendasi dari dokter.

Berbagai alternatif yang telah direkomendasi bagi lansia dengan komorbid dan penyakit terminal, tetapi menurut pertimbangan dokter kondisinya tidak memungkinkan untuk dapat diberikan vaksin maka dokter akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa lansia tersebut tidak dapat divaksin. Surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti sertifikat vaksin ketika mereka datang ke berbagai fasilitas yang ada. Pertimbangan ini disebabkan Lansia adalah kelompok rentan dengan kebutuhan tinggi akan vaksin penyakit coronavirus 2019 (COVID19), tetapi orang-orang ini juga lebih rentan terhadap perkembangan efek samping terkait vaksin (Liang et al, 2022).

PENUTUP

Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia di Kelurahan Jelambar Baru dikategorikan baik. Ketika implementasi kebijakan COVID-19 berjalan dengan baik, berarti kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi telah dilaksanakan secara efektif. Keberhasilan kebijakan COVID-19 pada akhirnya sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan publik kepatuhan masyarakat terhadap upaya yang paling utama yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara teratur dapat membantu membatasi penyebaran virus. Selain itu, individu dapat berkontribusi dalam menyukseskan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Jelambar Baru. Penting bagi individu untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dan kesehatan orang lain dengan mengikuti

pedoman dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan otoritas kesehatan. Maka disarankan untuk pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia yakni: (1).Perlu diperhatikan bahwa sistem kekebalan tubuh kelompok lanjut usia mungkin berbeda, sehingga efektivitas vaksin pada lansia perlu dipertimbangkan (2). Rekomendasi tentang Pemberian Vaksinasi COVID-19 pada Pasien dengan Penyakit Penderita/Komorbid dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan vaksinasi bagi lansia sehingga komunikasi efektif.

Kombinasi vaksinasi, penerapan disiplin 3M (memakai masker, jaga jarak, cuci tangan), dan penguatan 3T (tracking, testing, dan treatment) merupakan langkah efektif penanganan selain itu perlu ada kepatuhan dan kelancaran pelaksanaan fungsi rutin merupakan aspek penting dari implementasi kebijakan vaksin COVID-19. Perlunya ada komunikasi yang efektif, berkompentesinya sumber daya manusia, agar keraguan mengenai vaksin di kalangan masyarakat dapat hilang. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 untuk lansia dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai dengan mengatasi kekurangan dalam proses implementasi, memperkuat komunikasi dan sumber daya manusia, serta mengatasi keragu-raguan vaksin di masyarakat. Penting juga untuk terus menyosialisasikan pentingnya vaksinasi dan menyediakan akses vaksinasi bagi penduduk lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanawi, M.K., Alshareef, N., El-Sokary, R.H.2021. Willingness to Receive COVID-19 Vaccination among Older Adults in Saudi Arabia: A Community-Based Survey. *Vaccines*, 9(1257).<https://doi.org/10.3390/vaccines9111257>.
- Afifah, N. S. H., & Hertati, D. Efektivitas Program Undercover 112 COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 238-245.
- Aji, A. W., & Puspitasari, M. (2022). Penerimaan Masyarakat atas Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 104-113.
- Badrul Arifin. 2022. Government Communication Strategies in Time of Pandemic: Comparative Study between South Korea and Indonesia. *Policy & Governance Review*.6(2), pp. 189-205. DOI:<https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.546>.
- Cathal Fitz Gerald, Eoin O'Malley, Deiric Ó Broin. (2019). Policy success/policy failure: A framework for understanding. *Sciendo*

- Administration*, 67(2), pp. 1–24. <https://doi.org/10.2478/admin-2019-001>.
- Damayanthi HDWT, Prabani KIP, Weerasekara I. 2020 Factors Associated for Mortality of Older People With COVID 19: A Systematic Review and Meta-analysis. *Gerontology and Geriatric Medicine*. 2021;7. <https://doi.org/10.1177/23337214211057392>.
- Ernawati (2022). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kecemasan Lansia Comorbid dengan Pemberian Vaksinasi Covid-19. *Malahayati Nursing Journal*. Vol.4(3). <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i3.6033>.
- Gilmore B, Ndejjo R, Tchetchia A, et al. (2020). Community engagement for COVID-19 prevention and control: a rapid evidence synthesis. *BMJ Global Health* 5 (e003188). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003188>.
- Gresia L Hasibuan, Dicky Dermawan, Happy S Ginting, Iskandar Muda (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets in Indonesia. *International Journal of Research and Review*. 7(5). www.ijrrjournal.com.
- Jan M. Brauner, Sören Mindermann, Mrinank Sharma, David Johnston, John Salvatier, Tomáš Gavenčiak, Anna B. Stephenson, Gavin Leech, George Altman, Vladimir Mikulik, Alexander John Norman, Joshua Teperowski Monrad, Tamay Besiroglu, Hong Ge, Meghan A. Hartwick, Yee Whye Teh, Leonid Chindelevitch, Yarin Gal, And Jan Kulveit. (2020). Inferring the effectiveness of government interventions against COVID19. *SCIENCE*. 371(6531), <https://doi.org/10.1126/science.abd9338>.
- Jeff French. 2020. *Key Guidelines in Developing a Pre-Emptive COVID-19 Vaccination Uptake Promotion Strategy*. International journal of Enviromental research and Public Health. R
- Ida Masnita dkk. (2021). Pembentukan Persepsi Lansia Tentang Vaksinasi COVID-19 Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Signal* Volume 9, No. 2, Juli 2021, hlm 121-235 | Ilmu Komunikasi – FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati p-ISSN: 2580-1090, e-ISSN: 2337-4454.
- Mashur, D., Sadad, A., & Meiwanda, G. (2023). Model Implementation of the Village Sustainable Development Goals Policy in Buruk Bakul Village Bukit Batu District Bengkalis. *KnE Social Sciences*, 114-131
- OECD.2020.*Building resilience to the Covid-19 pandemic: the role of centres of government*.
- OECD.2020.*Transparency, communication and trust: The role of public communication in responding to the wave of disinformation about the new coronavirus*.
- Péterfi A, Mészáros Á, Szarvas Z, Péntes M, Fekete M, Fehér A, Lehoczki A, Csípő T, Fazekas-Pongor V. Comorbidities and increased mortality of COVID-19 among the elderly: A systematic review. *Physiol Int*. 2022 May 16. <https://doi.org/10.1556/2060.2022.00206>.
- Pramiyanti, A., Mayangsari, I. D., Nuraeni, R., & Darin Firdaus, Y. 2020. Public Perception on Transparency and Trust in Government Information Released During the COVID-19 Pandemic. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(3), 351–376. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2020.8.3.351>.
- Rahayu, D., Krisnawati, D., Susilowati, E., Yunarsih, Y., Santoso, P., & Alimansur, M. (2021). Optimalisasi Pencegahan dan Penganggulangan Covid 19 dengan Peran Serta sebagai Vaksinasi. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 3(4), 415-422. <https://doi.org/10.37287/jpm.v3i4.682>.
- Rulinawaty Kasmad (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara
- Sukmawati, Rijal, Musdalifah Haz (2021). Implementation of Government Collaboration Policy and Citizen Toward Coronavirus: A Literature Review. *Pinisi Discretion Review*. 4(2), p.303- 310.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan publik era globalisasic(teori,proses dan studi kasus kompratif)*. Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service). https://datawargadukcapil.jakarta.go.id/monitoring/rekap_pendataanvaksinlansia. (27 September 2022)
- Yazid, T. P., & Damanik, R. A. (2022). Kebijakan Vaksinasi Di Indonesia Dalam Framing Pemberitaan Media Online. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 73-80.